



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASRUDDIN CANIAGO
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 10920

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 945.114.000

1. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 106.879.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, WARISAN Rp. 147.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 690.735.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 375.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 282.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 751.785.842

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.354.799.842

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.354.799.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.